

PENGARUH KINERJA KEUANGAN PROVINSI TERHADAP KEMISKINAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI INTERVENING

Fery Panjaitan

fery_panjaitan@stie-ibek.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of regional financial performance on poverty with the variable of economic growth as an intervening. The population in this study was 33 provinces in Indonesia for the period 2011-2019. This study uses the PLS-SEM (Partial Least Square-Structural Equation Modeling) model with the WARP-PLS 7.0 application with measurement of the outer model test, inner model test, fit model test, and variance accounted for (VAF). The results of the study were the ratio of regional independence and effectiveness ratio of PAD did not affect poverty, the ratio of regional financial efficiency and activity ratio had a significant positive effect and the growth ratio of PAD had a significant positive effect. Economic growth has a significant positive effect on poverty. Meanwhile, the results of the indirect effect of the economic growth variable do not mediate the effect of financial performance, which is measured by the ratio of regional independence, the ratio of PAD effectiveness, the ratio of regional financial efficiency, the ratio of activity, and the ratio of PAD growth to poverty.

Keywords: *Regional financial performance, poverty, economic growth*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dapat disimpulkan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan juga untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dan hasil pembangunan daerah sesuai dengan amanat undang-undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan definisi tentang otonomi daerah yaitu suatu hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian undang-undang tersebut telah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan daerahnya sesuai kewenangan yang dimilikinya dengan cara mengoptimalkan potensi dan sumber daya guna dapat mewujudkan kemandirian daerah dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Melalui UU No.32 tahun 2004 tersirat keinginan adanya perubahan dalam mekanisme hubungan Pusat dan Daerah, yang sebelum UU tersebut lahir terkesan sangat sentralistik. Keberpihakan terhadap desentralisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam perjalanan bangsa Indonesia yang saat ini memiliki sistem demokratisasi. Desentralisasi akan memberikan keleluasaan pada daerah dalam hal mengurus, mengatur, mengelola kewenangan, dan keuangan daerah secara mandiri. Salah satu keleluasaan yang diberikan kepada daerah dalam otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan dalam hal ini APBD, bertujuan agar dapat terwujudnya kemandirian daerah. Dalam hal tersebut maka daerah diharapkan mampu mengelola APBD dengan baik sehingga tujuan yang terdapat pada UU No.32 tahun 2004 yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan daerah untuk dapat mengetahui capaian keuangan suatu daerah. Oleh karena itu pengukuran kinerja daerah harus dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, transparansi, akuntabilitas dan adanya partisipasi masyarakat guna mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan berdampak pada pengurangan jumlah kemiskinan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. (Panjaitan, 2020).

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Tujuannya untuk penilaian secara internal maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek domino yang positif yaitu menurunkan tingkat kemiskinan. (Astuti, 2015). Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran diukur dengan menggunakan beberapa rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian. (Kumpangpune, 2021).

Sejalan dengan tujuan analisis rasio keuangan maka ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan adalah keberhasilan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan hal ini akan membuka kesempatan bagi daerah untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi disuatu daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun (Kumpangpune, 2021). Perkembangan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010

No.	Provinsi	Tahun (%)									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Aceh	1,13	1,74	0,56	-0,43	-2,61	1,38	2,31	2,79	2,39	
2.	Sumatera Utara	5,11	4,96	4,65	3,88	3,81	3,94	3,95	4,06	4,15	
3.	Sumatera Barat	4,88	4,88	4,69	4,53	4,23	4,00	4,07	3,95	3,87	
4.	Riau	2,78	1,06	-0,14	0,13	-2,24	-0,28	0,24	-0,01	0,49	
5.	Jambi	5,82	5,06	4,92	5,49	2,44	2,65	2,93	3,07	2,80	
6.	Sumatera Selatan	4,73	5,23	3,78	3,30	2,98	3,65	4,16	4,70	4,44	
7.	Bengkulu	4,97	4,98	4,28	3,74	3,44	3,63	3,38	3,42	3,44	
8.	Lampung	5,16	5,09	4,48	3,85	3,95	4,01	4,09	4,21	4,30	
9.	Bangka Belitung	4,52	3,18	2,92	2,43	1,89	1,95	2,35	2,37	1,31	
10.	Kepulauan Riau	3,53	4,27	3,97	3,49	3,03	2,12	-0,69	1,83	2,30	
11.	DKI	5,51	5,34	4,92	4,81	4,84	4,84	5,21	5,16	4,92	
12.	Jawa Barat	4,78	4,82	4,70	3,52	3,52	4,17	3,89	4,25	3,72	
13.	Jawa Tengah	4,40	4,47	4,27	4,46	4,68	4,49	4,52	4,59	4,71	
14.	DIY	3,94	4,11	4,23	3,95	3,75	3,87	4,11	5,06	5,48	
15.	Jawa Timur	5,66	5,90	5,37	5,18	4,80	4,96	4,87	4,92	5,00	
16.	Kalimantan Barat	3,68	4,13	4,32	3,37	3,28	3,63	3,66	3,62	3,69	
17.	Kalimantan Tengah	4,45	4,36	4,89	3,81	4,64	4,05	4,47	3,43	3,99	
18.	Kalimantan Timur	3,63	2,73	0,15	-0,58	-3,37	-2,50	0,99	0,58	2,70	
19.	Kalimantan Selatan	4,91	3,99	3,43	3,01	2,08	2,71	3,64	3,50	2,57	
20.	Bali	5,31	5,63	5,40	5,47	4,80	5,13	4,41	5,18	4,51	
21.	NTB	-5,29	-2,92	3,73	3,78	20,20	4,50	-1,11	-5,61	2,73	
22.	NTT	3,85	3,67	3,65	3,32	3,22	3,44	3,44	3,46	3,61	
23.	Sulawesi Selatan	6,86	7,63	6,43	6,39	6,08	6,34	6,17	6,05	5,95	
24.	Sulawesi Tengah	7,91	7,67	7,77	3,37	13,68	8,24	5,49	18,80	7,28	
25.	Sulawesi Utara	4,87	5,60	5,17	5,14	5,00	5,08	5,27	5,00	4,70	
26.	Sulawesi Tenggara	8,18	9,22	5,20	4,03	4,68	4,36	4,65	4,34	4,49	
27.	Maluku	4,40	5,22	3,37	4,77	3,66	3,94	4,05	4,17	3,70	
28.	Papua	-6,19	-0,28	6,45	1,68	5,36	7,17	2,78	5,47	-17,16	
29.	Banten	4,53	4,40	4,31	3,24	3,24	3,14	3,67	3,75	3,36	
30.	Gorontalo	5,91	6,14	5,94	5,57	4,57	4,90	5,14	4,94	4,88	
31.	Papua Barat	0,91	0,93	4,60	2,71	1,56	1,96	1,52	3,75	0,29	
32.	Sulawesi Barat	8,59	7,15	4,89	6,79	5,30	4,04	4,43	4,33	3,78	

No.	Provinsi	Tahun (%)								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
33.	Maluku Utara	4,41	4,64	4,09	3,29	3,94	3,67	5,59	5,82	4,15

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS,2021)

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata perkembangan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami fluktuasi tiap tahunnya dari tahun 2010 sampai ke tahun 2019.

Keterkaitan antara Kinerja Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan yakni ketika kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia, masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia. (Kumpangpune, 2021). Berikut ini disajikan persentase penduduk miskin menurut provinsi tahun 2011-2019 :

Tabel 2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi

No.	Provinsi	Tahun (%)								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Aceh	19,57	18,58	17,72	16,98	16,73	10,79	10,42	9,63	9,47
2.	Sumatera Utara	11,33	10,41	10,39	9,85	10,79	10,27	9,28	8,94	8,63
3.	Sumatera Barat	9,04	8,00	7,56	6,89	6,71	7,14	6,75	6,55	6,29
4.	Riau	8,47	8,05	8,42	7,99	8,82	7,67	7,41	7,21	6,90
5.	Jambi	8,65	8,28	8,42	8,39	9,12	8,37	7,90	7,85	7,51
6.	Sumatera Selatan	14,24	13,48	14,06	13,62	13,77	13,39	13,10	12,82	12,56
7.	Bengkulu	17,70	17,51	17,75	17,09	17,16	17,03	15,59	15,41	14,91
8.	Lampung	16,93	15,65	14,39	14,21	13,53	13,86	13,04	13,01	12,30
9.	Bangka Belitung	5,75	5,37	5,25	4,97	4,83	5,04	5,30	4,77	4,50
10.	Kepulauan Riau	7,40	6,83	6,35	6,40	5,78	5,84	6,13	5,83	5,80
11.	DKI	3,75	3,70	3,72	4,09	3,61	3,75	3,78	3,55	3,42
12.	Jawa Barat	10,65	9,89	9,61	9,18	9,57	8,77	7,83	7,25	8,43
13.	Jawa Tengah	15,76	14,98	14,44	13,58	13,32	13,19	12,23	11,19	10,58
14.	DIY	16,08	15,88	15,03	14,55	13,16	13,10	12,36	11,81	11,44
15.	Jawa Timur	14,23	13,08	12,73	12,28	12,28	11,85	11,20	10,85	10,20
16.	Kalimantan Barat	8,60	7,96	8,74	8,07	8,44	8,00	7,86	7,37	7,28
17.	Kalimantan Tengah	6,56	6,19	6,23	6,07	5,91	5,36	5,26	5,10	4,81
18.	Kalimantan Timur	6,77	6,38	6,38	6,31	6,10	6,00	6,08	6,06	5,91
19.	Kalimantan Selatan	5,29	5,01	4,76	4,81	4,72	4,52	4,70	4,65	4,47
20.	Bali	4,18	3,95	4,49	4,76	5,25	4,15	4,14	3,91	3,61
21.	NTB	19,73	18,02	17,25	17,50	16,54	16,02	15,05	14,63	13,88
22.	NTT	21,23	20,41	20,24	19,60	22,58	22,01	21,38	21,03	20,65
23.	Sulawesi Selatan	10,29	9,82	10,32	9,54	10,12	9,24	9,48	8,87	8,56
24.	Sulawesi Tengah	15,83	19,94	14,32	13,61	14,07	14,09	14,22	13,69	13,18
25.	Sulawesi Utara	8,51	7,64	8,50	8,26	8,98	8,20	7,90	7,59	7,51

No.	Provinsi	Tahun (%)								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
26.	Sulawesi Tenggara	14,56	13,06	13,73	12,77	13,74	12,77	11,97	11,32	13,18
27.	Maluku	23,00	20,76	19,27	18,44	19,36	19,26	18,29	17,85	17,65
28.	Papua	31,98	30,66	31,53	27,80	28,40	28,40	27,76	27,43	26,55
29.	Banten	6,32	5,71	5,89	5,51	5,75	5,36	5,59	5,25	4,94
30.	Gorontalo	18,75	17,22	18,01	17,41	18,16	17,63	17,14	15,83	15,31
31.	Papua Barat	31,92	27,04	27,14	26,26	25,73	24,88	23,12	22,66	21,51
32.	Sulawesi Barat	13,89	13,01	12,23	12,05	11,90	11,19	11,18	11,22	10,95
33.	Maluku Utara	9,18	8,06	7,64	7,41	6,22	6,41	6,44	6,62	6,91

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS,2021)

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata perkembangan persentase penduduk miskin menurut provinsi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya walaupun tidak signifikan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Annisa, 2017) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian daerah dan rasio aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, rasio keuangan berupa rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Subhan, 2015) menyimpulkan kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dan kinerja keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan perbedaan hasil tersebut maka peneliti melakukan pengembangan dengan cakupan sampel yang digunakan pada tingkat provinsi di Indonesia dengan tahun pengamatan yang lebih panjang yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2019.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

LANDASAN TEORI

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja

pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dijalankan. (Halim, 2004). Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Analisis keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerah yang relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. (Halim, 2004).

Pertumbuhan Ekonomi

(Yasin, 2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Produktivitas suatu daerah dapat terlihat oleh produk domestik, sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terlihat dari sisi pendapatannya setelah memperhitungkan aliran pendapatan yang keluar masuk suatu daerah. Salah satu alat untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

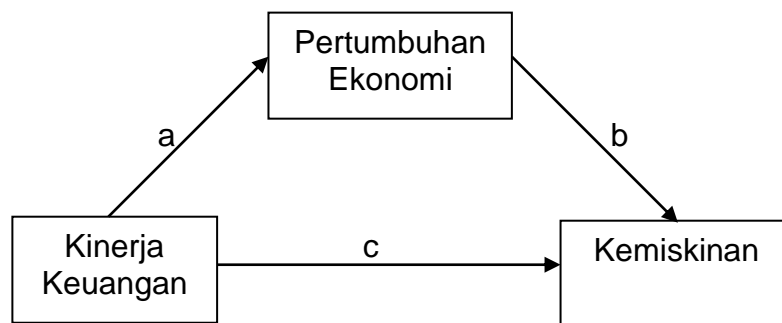
PDRB pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit dalam suatu daerah tertentu, atau jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk selanjutnya digunakan sebagai konsumsi “akhir” masyarakat. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku satu tahun tertentu sebagai dasar (BPS, 2021). (Maharani, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengukuran laju PDRB total maupun per sektor, akan lebih baik jika menggunakan perhitungan dengan berdasarkan harga konstan karena dengan menggunakan harga konstan pengaruh naik dan turunnya tingkat harga setiap tahun atau tingkat inflasi dapat dihilangkan sehingga perhitungannya menjadi riil.

Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan hal yang tidak bisa diselesaikan secara tuntas oleh suatu negara atau pemerintahan dalam waktu singkat. Definisi kemiskinan secara umum adalah seorang atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mendasar seperti pangan, sandang. Berbagai perencanaan, kebijakan, dan program dihadirkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menuntaskan persentase atau angka kemiskinan. Banyak

faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan antara lain tingkat pendidikan yang masih rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, malas bekerja, beban hidup keluarga dan keterbatasan sumber daya baik alam maupun modal.

Kadji (2012) menyatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan adalah adanya faktor internal yakni kebutuhan yang harus segera terpenuhi namun tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam berusaha mengelola sumber daya yang dimiliki (keterampilan tidak memadai, tingkat pendidikan, yang minim dan lain-lain) sedangkan faktor eksternal bencana alam serta tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin. Adapun Kerangka konseptual dalam penelitian ini terlihat seperti gambar dibawah ini :



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H₁ : Kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.**
- H₂ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.**
- H₃ : Kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.**
- H₄ : Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.**

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia selama 9 tahun yaitu dari tahun 2011-2019 yang berjumlah 33 provinsi. Provinsi Kalimantan Utara tidak diikutkan dalam sampel ini karena tidak di ketahui data pertumbuhan ekonomi

dan persentase penduduk miskin menurut provinsi untuk tahun 2011 dan 2012. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari DJPK.Kemenkeu.go.id dan BPS.go.id. Penelitian ini menggunakan model PLS-SEM (*Partial Least Square-Structural Equation Modelling*) dengan aplikasi *WARPPLS 7.0* dengan pengukuran uji *outer model*, uji *inner model*, uji *model fit*, dan *variance accounted for* (VAF).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah diukur dengan rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan PAD, kemiskinan sebagai variabel dependen, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berikut ini hasil analisis statistik deskriptif terhadap masing-masing variabel yang terdiri dari kinerja keuangan daerah yang diwakili oleh rasio kemandirian daerah (RKD), rasio efektivitas PAD (REFE), rasio efisiensi keuangan daerah (REFI), rasio aktivitas (RA), dan rasio pertumbuhan PAD (RPPAD), pertumbuhan ekonomi (PE), serta kemiskinan (KMKN).

Tabel 3 Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean
RKD	297	-0.799	7.389	-0.295
REFE	297	-2.563	3.095	-0.109
REFI	297	-3.580	8.259	0.029
RA	297	-2.241	4.278	-0.115
RPPAD	297	-2.456	4.692	-0.187
PE	297	-7.558	5.877	0.091
KMKN	297	-1.819	3.293	-0.246

Sumber :Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3, sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Indonesia sebanyak 33 Provinsi. Jumlah sampel pengamatan dimulai dari tahun 2011 sampai 2019 berjumlah 297 sampel. Adapun hasil statistik deskriptif menggambarkan nilai terkecil dari rasio kemandirian daerah (RKD) selama tahun 2011-2019 sebesar -0.799 sementara untuk nilai terbesar yaitu sebesar 7.389. Nilai rata-rata untuk variabel RKD sebesar -0.295. Hasil statistik deskriptif menggambarkan nilai terkecil dari rasio efektivitas PAD (REFE) selama tahun 2011-2019 adalah sebesar -2.563 sementara untuk nilai terbesar yaitu sebesar 3.095. Nilai rata-rata untuk variabel REFE sebesar -0.109. Hasil statistik deskriptif menggambarkan nilai terkecil dari rasio efisiensi keuangan daerah (REFI) selama tahun 2011-2019 sebesar -3.580 sementara untuk nilai terbesar yaitu sebesar 8.258. Nilai rata-rata untuk variabel REFI sebesar -0.029.

Rasio aktivitas (RA) terkecil selama tahun 2011-2019 sebesar -2.241 sementara untuk nilai terbesar yaitu sebesar 4.278. Nilai rata-rata untuk variabel RA sebesar -0.115. Rasio pertumbuhan PAD (RPPAD) terkecil selama tahun 2011-2019 sebesar -2.456 sementara untuk nilai terbesar yaitu sebesar 4.692. Nilai rata-rata untuk variabel RPPAD sebesar -0.187. Nilai terkecil dari pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar -7.558 dan nilai terbesar yaitu sebesar 5.877. Nilai rata-rata untuk variabel PE sebesar 0.091. Nilai terkecil dari variabel kemiskinan (KMKN) selama tahun 2011-2019 sebesar -1.819 dan nilai terbesar yaitu sebesar 3.293, sedangkan nilai rata-rata PE sebesar -0.246.

Uji Validitas Konvergen

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator reflektif dimana dalam pengujian outer model atau disebut model pengukuran dengan cara melihat nilai indikator reliability menggunakan ukuran nilai faktor loading. Adapun nilai faktor *loading* harus lebih besar dari 0.7 (Ghozali dan Latan, 2015). Hasil dari faktor *loading* dari masing-masing variabel terlihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 4. Nilai Faktor Loading

Variabel	Indikator Keterangan	Nilai	P.values
Rasio Kemandirian Daerah Diterima	RKD	1.000	<0.001
Rasio Efektivitas PAD Diterima	REFE	1.000	<0.001
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Diterima	REFI	1.000	<0.001
Rasio Aktivitas Diterima	RA	1.000	<0.001
Rasio Pertumbuhan PAD Diterima	RPPAD	1.000	<0.001
Pertumbuhan Ekonomi Diterima	PE	1.000	<0.001
Kemiskinan Diterima	KMKN	1.000	<0.001

Sumber :Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4 diatas maka dapat diketahui seluruh indikator memiliki nilai faktor *loading* diatas 0.7 dan memiliki nilai *P-values* <0.001 sehingga dapat disimpulkan seluruh indikator dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji item dari instrumen dapat digunakan dalam melakukan pengukuran lebih dari dua kali dengan hasil nilai akurat. Nilai *composite reliability coefficients* dikatakan reliabel jika mempunyai nilai <0.7 (Ghozali dan Latan, 2015).

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas dan Cronbach's Alpha

Composite Reliability Coefficients						
RKD	REFE	REFI	RA	RPPAD	PE	KMKN
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Cronbach's Alpha Coefficients						
RKD	REFE	REFI	RA	RPPAD	PE	KMKN
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber :Diolah, 2021

Dari tabel 5 diatas terlihat seluruh variabel memiliki nilai *composite reliability coefficients* diatas 0.7 yang dapat disimpulkan bahwa variabel beserta item dinyatakan reliabel.

Uji Validitas Konstruk

Uji validitas pada pengujian outer model digunakan dalam rangka menguji apakah item yang merepresentasikan konstruk laten valid sehingga dapat menjelaskan konstruk laten dapat diukur. Dengan kata lain nilai *average variance extracted* harus lebih dari 0,5 (Ghozali dan Latan, 2015). Hasil pengujian pada tabel 8 dibawah ini menunjukkan seluruh variabel memiliki *Average Variance Extracted* diatas 0,5 sehingga seluruh variabel konstruk dinyatakan memiliki validitas yang baik.

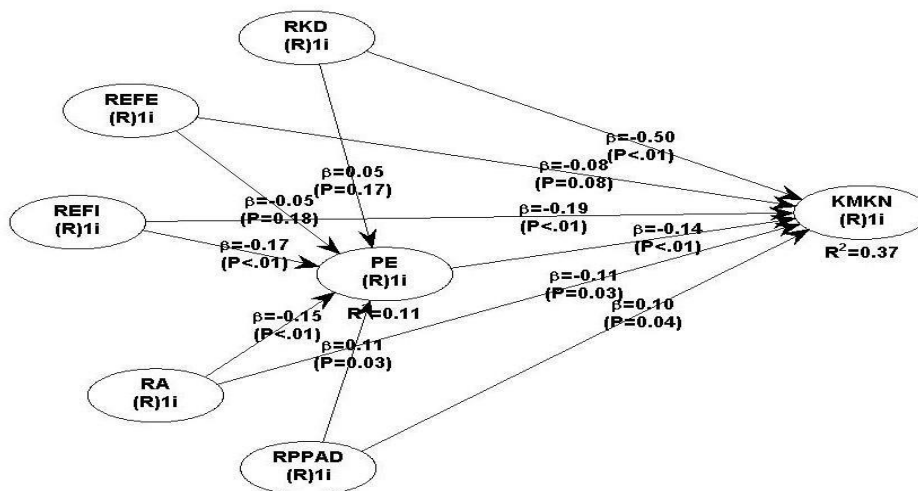
Tabel 6 Hasil Uji Validitas Average Variance Extracted

RKD	REFE	REFI	RA	RPPAD	PE	KMKN
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber : Diolah, 2021

Pengujian Inner Model

Analisa inner model menggambarkan hubungan antar variabel dengan melihat besarnya nilai Adjusted R-square dan Q-square sehingga dapat diketahui bahwa model memiliki predictive relevance.



Gambar 2 Struktur Model Penelitian

Tabel 7 Hasil Pengujian Latent Variable Coefficients

	PE	KMKN
<i>R-square</i>	0.112	0.369
<i>Adjusted R-Square</i>	0.097	0.356
<i>Q-square</i>	0.119	0.381

Sumber :Diolah, 2021

Hasil nilai Adjusted R-Square untuk variabel pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0.097 yang memiliki arti pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dengan 5 (lima) rasio terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 9,7% sedangkan nilai Adjusted R-Square untuk variabel kemiskinan (KMKN) sebesar 0.356 yang berarti variabel kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi (PE) dalam menjelaskan variasi variabel criterion adalah sebesar 35,6 % dan sisanya sebesar 64,4 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Nilai Adjusted R-Square tersebut termasuk kategori sedang. Untuk nilai Q-square yang dihasilkan oleh variabel endogen adalah lebih besar dari 0 yang mempunyai arti bahwa model dalam penelitian ini mempunyai predictive relevance.

Uji Model Fit

Pengujian uji model fit berfungsi untuk mengetahui kecocokan suatu model yang digunakan dalam penelitian ini yang menggunakan variabel eksogen yaitu Kinerja Keuangan Daerah (rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan PAD), variabel endogen intervening yaitu pertumbuhan ekonomi, dan variabel endogen yaitu kemiskinan.

Tabel 8 Hasil Model Fit

Hasil	P-Value	Kriteria	Keterangan
APC = 0.151	0.002	<i>Good if</i> $P < 0.05$	Signifikan
ARS = 0.241	0.001	<i>Good if</i> $P < 0.05$	Signifikan
AARS = 0.227	0.001	<i>Good if</i> $P < 0.05$	Signifikan
AVIF = 1.140		Diterima jika ≤ 5 , ideal jika $\leq 3,3$	Diterima dan ideal

Sumber :Diolah, 2021

Hasil model fit seperti terlihat pada tabel 8 menunjukkan nilai APC, ARS, AARS memiliki P-value dibawah 0.05 dan AVIF memiliki nilai ≤ 5 . Hal tersebut menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini sesuai atau memiliki model yang baik.

Pengujian Hipotesis

Pada tabel 9 berikut ini disampaikan hasil pengujian struktural nilai koefisien regresi dan signifikansi dari masing-masing hubungan langsung antar variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

Tabel 9 Nilai Koefisien Pengaruh Langsung

Hubungan Antar Variabel		Koefisien Regresi	P-value	Hasil
RKD	PE	0.053	0.173	Ditolak
REFE	PE	-0.053	0.177	Ditolak
REFI	PE	-0.170	0.001	Diterima
RA	PE	-0.148	0.004	Diterima
RPPAD	PE	0.110	0.026	Diterima
PE	KMKN	-0.141	0.006	Diterima
RKD	KMKN	-0.505	0.001	Diterima
REFE	KMKN	-0.080	0.078	Ditolak
REFI	KMKN	-0.191	0.001	Diterima
RA	KMKN	-0.110	0.026	Diterima
RPPAD	KMKN	0.101	0.037	Diterima

Sumber : Diolah, 2021

Selain menguji pengaruh langsung antar variabel, dalam penelitian ini juga dilakukan uji ada tidaknya efek mediasi atau uji pengaruh tidak langsung dengan syarat hasil koefisien jalur pengaruh langsung model penelitian signifikan.

Tabel 10. Nilai Koefisien Pengaruh Tidak Langsung

Hubungan Antar Variabel			Koefisien Regresi	P-value	Hasil
RKD	PE	KMKN	-0.008	0.426	Ditolak
REFE	PE	KMKN	0.007	0.427	Ditolak
REFI	PE	KMKN	0.024	0.276	Ditolak
RA	PE	KMKN	0.021	0.303	Ditolak
RPPAD	PE	KMKN	-0.016	0.350	Ditolak

Sumber : Diolah, 2021

Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengujian terhadap hipotesis pertama yang diukur oleh rasio kemandirian daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terbukti dimana diperoleh nilai $p\text{-value } 0.173 > 0.05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dwiandari dan Badera, 2018) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh rasio kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio kemandirian daerah adalah rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan membiayai pembangunan daerahnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh provinsi di Indonesia masing sangat bergantung terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Pengujian terhadap hipotesis pertama yang diukur oleh rasio efektivitas PAD mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terbukti dimana diperoleh nilai $p\text{-value } 0.177 > 0.05$. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syamsudin,dkk., 2015) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menandakan adanya perbedaan target penerimaan dan realisasi PAD pada hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Pengujian terhadap hipotesis pertama yang diukur oleh rasio efisiensi keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti dengan nilai $p\text{-value } 0.001 < 0.05$. Hasil pengujian ini juga menyatakan besaran hubungan variabel rasio efektivitas PAD terhadap koefisien sebesar -0.170 . Nilai tersebut menggambarkan bahwa pengaruh efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki arah yang berlawanan. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian (Marsudi,dkk., 2019) dimana rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menyatakan bahwa nilai rasio rata-rata rasio efisiensi provinsi di Indonesia lebih dari 100% dan dibawah 100%.

Pengujian terhadap hipotesis pertama yang diukur oleh rasio aktivitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti dengan dengan nilai $p\text{-value}$

0.004 < 0.05. Hasil pengujian ini juga menyatakan besaran hubungan variabel rasio aktivitas terhadap koefisien sebesar -0.148. Nilai tersebut menggambarkan bahwa pengaruh rasio aktivitas memiliki arah yang berlawanan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sudrajat, 2018) dimana menyimpulkan rasio keserasian berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menyatakan bahwa rata-rata alokasi dana belanja modal seluruh provinsi daerah di Indonesia sangat kecil dibanding dengan belanja lainnya.

Pengujian terhadap hipotesis pertama yang diukur oleh rasio pertumbuhan PAD mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti dengan nilai p-value sebesar 0.026 < 0.05. Besaran hubungan variabel rasio pertumbuhan PAD terhadap koefisien sebesar 0.010 sehingga rasio pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang searah. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anisa, 2017) dimana rasio pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian ini menyatakan bahwa pemerintah provinsi di Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan PAD secara positif setiap tahunnya.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan.

Pengujian hipotesis kedua yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan terbukti dengan nilai p-value 0.006 < 0.05. Hasil penelitian ini juga menghasilkan besaran hubungan variabel rasio pertumbuhan ekonomi terhadap koefisien sebesar -0.141. Penelitian yang dilakukan oleh (Paramita dan Purbadharmaja, 2015) menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini menyatakan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan kemiskinan.

Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan.

Pengujian hipotesis ketiga yang diukur melalui rasio kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan terbukti dengan nilai p-value 0.001 < 0.05. Hasil penelitian ini juga menghasilkan besaran hubungan variabel rasio kemandirian daerah terhadap kemiskinan sebesar -0.505. Penelitian yang dilakukan oleh (Saerang dan Engka, 2021) juga menyimpulkan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap

kemiskinan, dimana hal tersebut menyatakan setiap kenaikan rasio kemandirian daerah berdampak terhadap penurunan kemiskinan.

Pengujian hipotesis ketiga yang diukur melalui rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan tidak terbukti dengan nilai $p\text{-value } 0.078 > 0.05$. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh Raharja (2019) menyimpulkan hal yang sama bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Pengujian hipotesis ketiga yang diukur melalui rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan terbukti dengan nilai $p\text{-value } 0.001 < 0.05$. Besaran hubungan variabel rasio efisiensi keuangan daerah terhadap kemiskinan sebesar -0.191. Hasil penelitian Sari dan Baihaqi (2009) juga menyimpulkan hasil yang sama bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, dimana setiap kenaikan rasio efisiensi keuangan daerah berdampak kepada penurunan kemiskinan.

Pengujian hipotesis ketiga yang diukur melalui rasio aktivitas berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan terbukti dengan nilai $p\text{-value } 0.026 < 0.05$. Besaran hubungan variabel rasio aktivitas terhadap kemiskinan sebesar -0.110. Hasil pengujian ini dapat dinyatakan bahwa setiap kenaikan variabel rasio aktivitas berdampak terhadap penurunan kemiskinan. Sejauh ini belum didapat hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh rasio aktivitas terhadap kemiskinan.

Pengujian hipotesis ketiga yang diukur melalui rasio pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan terbukti dengan nilai $p\text{-value } 0.037 < 0.05$. Sedangkan besaran hubungan variabel rasio pertumbuhan PAD terhadap kemiskinan sebesar 0.101. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yudisia, dkk., 2019) yang menghasilkan kesimpulan bahwa rasio pertumbuhan PAD tidak mempengaruhi kemiskinan.

Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi.

Pengujian hipotesis keempat antara variabel kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio yang terdiri dari rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan

terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi tidak terbukti dimana diperoleh masing-masing nilai p-value rasio kemandirian daerah $0.426 > 0.05$, rasio efektivitas PAD $0.427 > 0.05$, rasio efisiensi keuangan daerah $0.27 > 0.05$, rasio aktivitas $0.303 > 0.05$, dan rasio pertumbuhan PAD $0.350 > 0.05$. Hasil tersebut menyatakan bahwa rasio pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengaruh variabel kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan.. Berdasarkan hasil tersebut maka tidak diperlukan pengujian variance accounted for (VAF). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurulita dkk., 2018) menyimpulkan pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengaruh kinerja keuangan yang diukur melalui rasio kemandirian daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap kemiskinan.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan hasil hipotesis pertama bahwa rasio keuangan daerah yang diukur dengan rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh dan rasio aktivitas berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil hipotesis kedua pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Hipotesis ketiga menyimpulkan rasio kemandirian daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio aktivitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan, sedangkan rasio pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hipotesis keempat menghasilkan kesimpulan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai efek mediasi pengaruh kinerja keuangan daerah yang diukur melalui rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan PAD terhadap kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi, (2012), *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep, dan aplikasi*, Jakarta, Salemba Empat.
Abdul Halim, (2004), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.

- Annisa, F. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan, Pengangguran, Indeks, Pembangunan Manusia dan Indeks Gini (Doctoral dissertation, STIE YKPN).
- Astuti, W. (2015). Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan (studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa periode 2007-2011). *EBBANK*, 6(1), 1-18.
- Badan Pusat Statistik (2021), Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010, Badan Pusat Statistik (BPS).
- Badan Pusat Statistik (2021), Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2020, Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jenderal Perimbangan (2021), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Portal APBD.
- Dwiyandari, L. D. Y., & Badera, I. D. N. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 1741-1770.
- Kadji, Y. (2012). Kemiskinan dan Konsep teoritisnya. *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNG*.
- Kumpangpune, N., Saerang, D. P., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(3), 60-77.
- Maharani, D. (2017). Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Sumatera Utara. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 8(2), 32-46.
- Marsudi, J., Supradi, A., & Susandra, F. (2019). Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Kajian Pada Provinsi Jawa Barat. *JURNAL AKUNIDA*, 5(2), 32-46.
- Nurulita, S., Arifulsyah, H., & Yefni, Y. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Riau. *Jurnal Benefita*, 3(3), 336-356.
- Panjaitan, F. (2020). Analisis Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 2(2), 136-148.
- Paramita, A. I. D., & Purbadharmaja, I. P. (2015). Pengaruh Investasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(10), 44574.
- Puspita Sari, D., & Baihaqi, B. Analisa Kinerja Keuangan terhadap pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan (*Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomi UNIB).
- Raharja, T. E. (2019). Analisa kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3(2).
- Sadono Sukirno (2005), *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
- Subhan, Muhammad. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2010-2013. *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*.

- Sudrajat, D. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bandung Barat (Doctoral dissertation, Perpustakaan Pascasarjana).
- Syamsudin, S., Cahya, B. T., & Dewi, S. N. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 17(1), 15-27.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 465-472.
- YUDISIA, N., & Verawaty, V. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan) (*Doctoral dissertation*, Universitas Bina Darma).